



Peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Program Vokasi

Dony Jayeswara^{1*}, Muh. Maburur Haslan¹, Ega Anzani¹

¹ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2741>

Article Info:

Received : 17 Juni 2026
Revised : 26 Juni 2026
Accepted : 22 Juli 2026
Published : 28 Juli 2026

Correspondence:

Dony Jayeswara

Phone: 082339690353

Abstract: Persons with disabilities in Mataram City face a gap between the ideal guarantee of vocational rights (Law No. 8 of 2016, Ministerial Regulation No. 7 of 2021) and the actual low rate of employment absorption, with only 47 individuals absorbed into the formal sector out of a work-ready adult population reaching 1,441 individuals. This study aims to analyze the role of the Mataram City Social Service in empowering persons with disabilities through vocational programs, as well as the factors that influence it. The research employs a qualitative descriptive approach, with subjects determined purposively and informants through *snowball sampling*, using interviews, observation, and documentation studies, analyzed using the Miles and Huberman interactive model, with validity tested through triangulation. The findings show that the Social Service has carried out its role across six indicators access and participation, training quality, skills improvement, job placement and entrepreneurship, support and facilitation, and collaboration and partnership although outcomes are more prominent in small-scale home-based entrepreneurship than in formal job placement. Internal factors (budget, human resources, facilities) and external factors (regulation, partnerships, social stigma) also influence the effectiveness of this role. The study concludes that the success of empowerment depends on the synergy between institutional capacity and the surrounding supportive ecosystem.

Keywords: Social Service Office; Empowerment; Persons with Disabilities; Vocational Program.

Citation: Jayeswara, D., Haslan, M. M., & Anzani, E. (2026). Peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Program Vokasi. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(3), 4487–4492. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2741>

Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral warga negara yang berhak memperoleh pemberdayaan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Secara ideal, hak ini telah dijamin dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* yang diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011, khususnya Pasal 27 tentang hak atas pekerjaan dan pelatihan vokasional yang inklusif, serta Pasal 26 tentang rehabilitasi-rehabilitasi menuju kemandirian penuh (United Nations, 2006). Di tingkat nasional, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan pemberdayaan sebagai strategi wajib

negara, diperkuat secara teknis oleh Permensos No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang menempatkan pelatihan vokasional sebagai instrumen utama menuju kapabilitas fungsional dan kemandirian ekonomi (Kementerian Sosial RI, 2021).

Namun, kondisi aktual di lapangan menunjukkan kesenjangan yang tajam dari harapan normatif tersebut. Data International Labour Organization (2020), mencatat hanya sekitar tiga dari sepuluh penyandang disabilitas yang aktif di pasar kerja global. Di tingkat lokal, Badan Pusat Statistik Kota Mataram (2024), mencatat baru sekitar 47 penyandang disabilitas yang terserap di sektor

formal, sementara Dinas Sosial Kota Mataram (2025) mendata populasi usia dewasa siap kerja mencapai 1.441 dari total 1.780 penyandang disabilitas. Kesenjangan besar antara populasi siap kerja dan angka penyerapan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program vokasi meski secara regulatif telah diamanatkan melalui Perda NTB No. 4 Tahun 2019 dan Perwal Mataram No. 38 Tahun 2016 masih menghadapi tantangan signifikan dalam jangkauan, kualitas, dan keberlanjutan pendampingannya di tingkat implementasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroiti isu pemberdayaan vokasional bagi penyandang disabilitas, namun dengan fokus yang berbeda-beda. Ramadhani dan Fawzi (2021) mengkaji pemberdayaan melalui kemitraan social enterprise berbasis aplikasi di Jakarta; Wati dkk. (2025) menyoroiti penguatan kemandirian fisik melalui distribusi alat bantu di NTB; Puteri dan Nawangsari (2024) menganalisis peran Dinas Sosial dalam program bantuan sosial (ASPD Plus) yang bersifat karitatif; sementara Saputra dkk. (2024) mengevaluasi kinerja organisasi Dinas Sosial secara umum tanpa pisau analisis peran yang spesifik. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa penelitian mengenai peran Dinas Sosial tingkat kota dalam pengelolaan program vokasi secara terpadu yang mencakup akses, kualitas pelatihan, peningkatan keterampilan, penyaluran kerja/kewirausahaan, dukungan-fasilitas, hingga kolaborasi kemitraan sekaligus masih jarang dilakukan, terutama pada konteks daerah seperti Kota Mataram.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan teori peran Soekanto (2002) dan tahapan pemberdayaan Suharto (2009) ke dalam kerangka analisis enam indikator peran (akses partisipasi, kualitas pelatihan, peningkatan keterampilan, penyaluran kerja dan kewirausahaan, dukungan dan fasilitas, serta kolaborasi dan kemitraan), yang dianalisis berpasangan dengan faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung meninjau satu aspek program (bantuan sosial, alat bantu, atau kinerja organisasi secara umum) tanpa memetakan peran instansi secara menyeluruh dan sistemik dalam konteks program vokasi murni. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program vokasi, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam

pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program vokasi beserta faktor-faktor yang memengaruhinya (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Mataram, Jl. R.A. Kartini No. 3, Kota Mataram NTB, sebagai instansi yang secara struktural membawahi bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas.

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, dan instruktur pelatihan vokasi, yang dipilih berdasarkan relevansi jabatan dengan fokus kajian. Informan ditentukan melalui *snowball sampling*, mencakup penyandang disabilitas peserta program, keluarga peserta, dan masyarakat sekitar, guna memperoleh sudut pandang penerima manfaat secara berjenjang.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam kepada subjek dan informan untuk menggali persepsi dan pengalaman terkait pelaksanaan program; (2) observasi lapangan terhadap proses pelatihan, kondisi fasilitas, dan interaksi petugas-peserta; serta (3) studi dokumentasi terhadap arsip resmi Dinas Sosial (laporan program, data peserta, SOP) dan literatur pendukung (regulasi dan penelitian terdahulu). Ketiga teknik ini saling melengkapi data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (dokumen, studi literatur).

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (dalam Abdussamad, 2021), melalui tiga tahap berkelanjutan: reduksi data (penyederhanaan dan pemusatan data lapangan pada fokus enam indikator peran serta faktor internal-eksternal), penyajian data (pengorganisasian dalam bentuk naratif dan tabulasi tematik), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (interpretasi bertahap yang diuji ulang terhadap bukti lapangan hingga data jenuh).

Hasil dan Diskusi

Peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Program Vokasi

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program vokasi. Analisis dilakukan secara komprehensif yang dibedah ke dalam enam indikator utama, sebagai berikut:

Akses Informasi

Akses informasi, menunjukkan bahwa pendataan penyandang disabilitas dijalankan secara berkala oleh enam pendamping disabilitas tingkat kecamatan, menjadi dasar penyaringan

peserta dengan kuota 20-30 orang per angkatan berdasarkan usia produktif dan kesesuaian ragam disabilitas. Sosialisasi dilakukan proaktif melalui metode door-to-door dan kolaborasi lintas instansi (kelurahan, kecamatan, BLK, Disnaker). Fasilitas pelatihan memanfaatkan BLK dan aula Dinas Sosial yang aksesibel, dilengkapi bantuan alat kerja pascapelatihan (kompor, panci, rombong, blender) yang disesuaikan keterbatasan fisik peserta. Merujuk teori peran Soekanto (2002), praktik ini merupakan peran aktual yang selaras dengan peran ideal sebagaimana diamanatkan UU No. 8 Tahun 2016. Namun demikian, jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar jauh melebihi kapasitas kuota, sehingga akses yang diberikan tetap bersifat selektif dan bergilir menunjukkan bahwa pemberian akses setara menurut Mardikanto (2012) belum sepenuhnya menjawab skala kebutuhan riil.

Kualitas Program Pelatihan.

Kualitas Program Pelatihan, dapat dilihat dari Jenis pelatihan yang dimana divariasikan setiap tahun (boga, jasa, ekonomi kreatif) disesuaikan kapabilitas fisik peserta dan kebutuhan pasar lokal. Kurikulum bersifat adaptif dengan instruktur direkrut dari LPK, pegiat UMKM, Disperindag, dan guru SMK, tanpa menurunkan standar materi. Metode pelatihan menerapkan pendekatan learning by doing dengan penyesuaian teknis per ragam disabilitas, seperti komunikasi visual bagi tuna rungu. Kesesuaian ini mencerminkan pencapaian peran seharusnya (planned role) sekaligus tahap pengkapisitasan dalam kerangka Suharto (2009), dan menjawab konsep keterbatasan aktivitas (activity limitation) dalam ICF WHO (2001), yang menegaskan bahwa hambatan pelaksanaan tugas dapat diminimalkan melalui penyesuaian pendekatan, bukan penyeragaman metode.

Peningkatan Keterampilan dan Kemandirian.

Peserta menunjukkan peningkatan kompetensi baik teknis (produksi, pengemasan) maupun psikologis (kepercayaan diri, keberanian sosial-ekonomi). Alumni terbukti mampu menghasilkan produk/jasa bernilai ekonomi secara mandiri, didukung stimulan peralatan kerja sebagai modal awal. Temuan ini menunjukkan tercapainya tahap penyadaran dan pendayaan

sekaligus, sejalan dengan tujuan pemberdayaan Mardikanto (2012) berupa perbaikan usaha (better business) dan perbaikan pendapatan (better income).

Penyaluran Kerja dan Kewirausahaan.

Penyerapan lulusan lebih banyak terwujud melalui kewirausahaan mandiri berskala rumahan dibanding penempatan kerja formal. Kerja sama dengan dunia usaha/industri masih bersifat penajakan informal, belum berbentuk MOU mengikat, sehingga kuota kerja disabilitas normatif (1% swasta, 2% instansi pemerintah/BUMN/BUMD) belum terealisasi optimal. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara peran ideal dan peran aktual Dinas Sosial, dan memperkuat pandangan Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015) bahwa sistem harapan sosial terhadap Dinas Sosial sebagai jembatan aktif ke dunia kerja belum terpenuhi secara utuh.

Dukungan dan Fasilitas.

Dukungan dan Fasilitas, menunjukkan bahwa Dinas Sosial konsisten memberikan bantuan alat kerja pascapelatihan sebagai wujud tahap pengkapisitasan, seperti kompor, blender, dan rombong yang memungkinkan peserta langsung mempraktikkan keterampilannya secara mandiri di rumah. Namun demikian, pendampingan lanjutan pascapelatihan dan akses permodalan bagi peserta masih terbatas, sehingga sebagian alumni kesulitan mengembangkan usahanya melampaui skala awal yang dirintis. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran fasilitatif Dinas Sosial baru optimal pada tahap penyediaan sarana awal, namun belum sepenuhnya menjangkau keberlanjutan usaha peserta secara jangka Panjang mengindikasikan adanya kesenjangan antara peran ideal pendampingan berkelanjutan dan peran aktual yang masih terbatas pada dukungan bersifat stimulan di awal program.

Kolaborasi dan Kemitraan.

Adapun Kolaborasi dan Kemitraan menunjukan Sinergi dengan Disnaker, BLK, dan Baznas berjalan harmonis dan sistematis (sinkronisasi data, penyediaan instruktur, fasilitas, pendanaan alat), sedangkan kerja sama dengan komunitas disabilitas masih informal. Sinergi dengan Disnaker, BLK, dan Baznas berjalan

harmonis dan sistematis (sinkronisasi data, penyediaan instruktur, fasilitas, pendanaan alat), sedangkan kerja sama dengan komunitas disabilitas masih informal. Pola ini merepresentasikan prinsip *better institution* Mardikanto (2012), yaitu penguatan kapasitas lembaga melalui jejaring eksternal, bukan mengandalkan sumber daya internal semata

Faktor yang Mempengaruhi Peran Dinas Sosial Kota Mataram

Pelaksanaan peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam program vokasi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

Faktor Internal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan perencanaan program sudah terstruktur melalui pemetaan kebutuhan berjenjang, di mana Dinas Sosial menyusun rencana pelatihan setiap tahun berdasarkan hasil pendataan enam pendamping disabilitas di tingkat kecamatan, mencakup penentuan jenis pelatihan, penyiapan instruktur, hingga pengalokasian anggaran sejak awal. Merujuk teori peran Soekanto (2002), mekanisme ini merepresentasikan peran seharusnya (*planned role*) yang diterjemahkan Dinas Sosial dari amanat normatif UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No. 18 Tahun 2016 menjadi langkah operasional yang terarah.

Ketersediaan anggaran terkonfirmasi sebagai faktor yang paling membatasi ruang gerak Dinas Sosial. Ketika anggaran mencukupi, kuota pelatihan dapat melebihi angkatan dalam setahun, namun ketika terbatas, penyesuaian dilakukan pada jumlah peserta, durasi, maupun jenis pelatihan yang pada gilirannya memengaruhi kedalaman materi yang dapat disampaikan instruktur. Keterbatasan ini berhasil dikompensasi melalui pola pelatihan estafet bersama BLK, di mana Dinas Sosial menyelenggarakan pelatihan dasar sebelum peserta dilanjutkan mengikuti pelatihan intensif dengan anggaran BLK sendiri, serta kolaborasi dengan Baznas untuk pengadaan peralatan modal kerja pascapelatihan. Strategi ini sejalan dengan prinsip *better institution* dalam teori tujuan pemberdayaan Mardikanto (2012), yaitu penguatan kelembagaan melalui jejaring

kemitraan ketika sumber daya internal terbatas. Dari sisi sumber daya manusia, enam pendamping disabilitas yang tersebar di seluruh kecamatan menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan, didukung instruktur multisumber dari LPK, pegiat UMKM, Disperindag, dan SMK yang dinilai kompeten sekaligus adaptif dalam menyesuaikan cara mengajar dengan kondisi masing-masing peserta, termasuk pendekatan komunikasi visual bagi peserta tuna rungu.

Sarana-prasarana internal berupa aula kantor dinilai memadai untuk pelatihan dasar dengan kebutuhan peralatan yang tidak terlalu kompleks, dan dilengkapi kemitraan dengan BLK untuk mengakomodasi pelatihan yang membutuhkan fasilitas lebih intensif menegaskan bahwa keterbatasan sarana internal tidak serta-merta menjadi penghambat mutlak selama institusi mampu membangun pola kemitraan strategis.

Monitoring dan evaluasi berjalan melalui dua jalur, yaitu pemantauan langsung oleh pendamping terhadap perkembangan usaha peserta pascapelatihan dan evaluasi internal di akhir setiap program untuk menilai capaian target sekaligus efektivitas metode pengajaran instruktur. Namun demikian, intensitas monitoring ini belum merata jangkauannya mengingat keterbatasan jumlah pendamping yang harus menjangkau wilayah yang luas. Mengacu pada konsep peran aktual (*actual role*) Soekanto (2002), kondisi ini mengonfirmasi adanya kesenjangan antara peran ideal pemantauan berkelanjutan dan kapasitas riil institusi akibat keterbatasan rasio pendamping terhadap populasi sasaran, meskipun mekanisme yang telah berjalan tetap menunjukkan komitmen Dinas Sosial untuk memperbaiki kualitas program dari satu siklus ke siklus berikutnya.

Faktor Eksternal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi (UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 18 Tahun 2016, Perwal Mataram No. 38 Tahun 2016) berfungsi ganda sebagai landasan legitimasi sekaligus pendorong komitmen kelembagaan yang berkelanjutan. Payung hukum ini memberikan Dinas Sosial keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran, menjalin kerja sama lintas instansi, serta memprioritaskan penyandang disabilitas sebagai sasaran utama program, sebagaimana tercermin dari konsistensi pelaksanaan program dari tahun

ke tahun. Partisipasi aktif peserta terbukti berbanding lurus dengan capaian program: peserta yang aktif bertanya, mau mencoba berulang kali, dan tidak mudah menyerah menunjukkan kemajuan yang lebih pesat dibanding peserta yang cenderung pasrah akibat ketergantungan jangka panjang pada keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak semata ditentukan oleh kualitas penyelenggara program, melainkan juga oleh kesiapan mental kelompok sasaran sebagai subjek, bukan sekadar objek pemberdayaan, sebagaimana ditekankan oleh Ife dalam Suharto (2009).

Dukungan keluarga dan lingkungan turut memengaruhi motivasi dan kecepatan peserta memulai usaha mandiri pascapelatihan, baik secara material maupun emosional. Namun demikian, pola asuh keluarga yang terlalu protektif justru dapat menjadi penghambat, karena tanpa disadari memupuk ketergantungan alih-alih mendorong kemandirian menggambarkan bahwa proses pemberdayaan tidak berlangsung dalam ruang yang terisolasi, melainkan dipengaruhi relasi sosial di sekitar individu.

Akses informasi dan sosialisasi terbukti efektif dijalankan melalui pendekatan langsung oleh pendamping di setiap kecamatan, sehingga sebagian besar peserta mengetahui program justru dari kunjungan pendamping, bukan dari pencarian informasi secara mandiri. Meski demikian, keterbatasan jumlah pendamping menjadi hambatan dalam pemerataan sosialisasi, sehingga masih ada penyandang disabilitas di sejumlah wilayah yang belum mengetahui keberadaan program ini.

Stigma dan diskriminasi sosial tetap menjadi hambatan partisipasi (*participation restriction*) terberat dalam kerangka ICF WHO (2001), karena bersifat eksternal namun berdampak mengikis kepercayaan diri secara internal, bahkan kerap terinternalisasi dalam diri peserta sendiri sehingga membentuk hambatan psikologis yang lebih berat dibanding hambatan teknis apa pun. Meski demikian, ditemukan pula indikasi perubahan pandangan masyarakat secara perlahan setelah menyaksikan langsung hasil nyata usaha yang dirintis peserta pascapelatihan. Temuan ini memperkuat argumen Mardikanto (2012) bahwa pemberdayaan individu perlu diiringi perbaikan

kondisi sosial (*better community*) agar dampaknya berkelanjutan.

Dibandingkan penelitian terdahulu, temuan ini memperluas pemahaman yang dibangun Ramadhani dan Fawzi (2021) serta Puteri dan Nawangsari (2024): jika penelitian-penelitian tersebut menyoroti pemberdayaan melalui kemitraan *social enterprise* atau bantuan sosial karitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah tingkat kota dapat menjalankan peran pemberdayaan produktif secara terpadu mencakup enam dimensi peran sekaligus faktor internal-eksternal meskipun keterbatasan anggaran dan kemitraan formal dengan sektor swasta tetap menjadi tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program vokasi telah bergeser dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan berkelanjutan, sebagaimana diproyeksikan dalam kerangka kesenjangan yang diangkat di bagian Pendahuluan antara jaminan hak vokasional normatif dan rendahnya keterserapan kerja aktual. Sintesis dari enam indikator peran menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan peran ideal, seharusnya, dan aktual secara cukup konsisten pada dimensi akses, kualitas pelatihan, serta peningkatan keterampilan dan kemandirian dibuktikan dengan sistem pendataan berjenjang, kurikulum adaptif, dan transformasi psikologis-ekonomi peserta pascapelatihan. Namun, kesenjangan peran paling nyata justru terjadi pada tahap hilir, yakni penyaluran kerja formal dan kemitraan dunia usaha yang masih informal, sehingga keberhasilan pemberdayaan lebih banyak terwujud melalui kewirausahaan mandiri berskala rumahan ketimbang penempatan kerja sektor formal. Temuan ini memperkuat argumen bahwa efektivitas peran kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara kapasitas internal dan ekosistem eksternal. Keterbatasan anggaran sebagai faktor internal utama terbukti dapat dikompensasi melalui strategi kemitraan strategis, sementara pada sisi eksternal, stigma sosial dan keterbatasan jangkauan sosialisasi tetap menjadi hambatan partisipasi yang bersifat psikologis sekaligus struktural. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan penyandang disabilitas bergantung pada sinergi tiga elemen sekaligus: penguatan kapasitas kelembagaan, perluasan kemitraan formal dengan sektor usaha, dan transformasi lingkungan sosial yang inklusif menjawab

kebaruan penelitian yang mengintegrasikan teori peran dan tahapan pemberdayaan secara menyeluruh dalam konteks instansi pemerintah tingkat kota. Ke depan, hasil penelitian ini berpotensi dikembangkan melalui kajian kuantitatif untuk mengukur tingkat keberlanjutan usaha alumni program vokasi secara longitudinal, serta studi komparatif antar kabupaten/kota di NTB guna menguji konsistensi pola peran dan faktor pengaruh yang ditemukan. Secara aplikatif, temuan ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Sosial Kota Mataram untuk merumuskan skema kemitraan formal dengan sektor swasta guna memenuhi kuota kerja disabilitas, memperkuat kapasitas pendamping disabilitas di tingkat kecamatan, serta merancang program edukasi publik yang sistematis untuk mengikis stigma sosial, sehingga pemberdayaan tidak hanya berhenti pada penguatan keterampilan individu tetapi juga pada transformasi ekosistem sosial ekonomi yang mendukung keberlanjutannya.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan akademiknya, kepada pihak Dinas Sosial Kota Mataram atas izin dan akses penelian. Terima kasih juga kepada narasumber, hingga penelitian ini selesai.

Referensi

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Badan Pusat Statistik Kota. (2024). Kota Mataram dalam angka 2024. Diakses dari <https://mataramkota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/a4fc62ff945a5389e0204278/kota-mataram-dalam-angka-2024.html>
- Barat, P. D. P. N. T. (2019). Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Diakses dari <https://jdih.ntbprov.go.id/>.
- Dinas Sosial Kota Mataram. (2025). Hasil Rekapitan Data Penyandang Disabilitas Kota Mataram. Laporan Data Internal Dinas Sosial Kota Mataram, Mataram.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- International Labour Organization. (2020). Ringkasan International Labour Organization.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Bentuk-bentuk pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Diakses dari <https://jdih.kemensos.go.id/produk-hukum/peraturan-menteri-sosial-nomor7-tahun-2021-tentang-asistensi-rehabilitasi-sosial>
- Mardikanto, T. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Puteri, A. S. C., & Nawangsari, E. R. (2024). Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Plus (ASPD Plus). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(1), 71–80.
- Ramadhani, S., & Fawzi, I. L. (2021). Proses pemberdayaan tenaga kerja disabilitas melalui pelatihan vokasional oleh PT Thisable Enterprise untuk disalurkan sebagai mitra Golife. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 2(2), from <https://doi.org/10.7454/jpm.v2i2.1023>
- Saputra, A. H., Arlan, A. S., & Munawarah. (2024). Kinerja Dinas Sosial dalam pemberdayaan disabilitas Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik*, 1090–1099.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat* (3rd ed.). Bandung: PT Refika AditamaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York, NY: United Nations.
- Wati, R., Yasmin, A., Widana, I. B. P., & Ferdaus, N. N. (2025). Penguatan kemandirian penyandang disabilitas melalui distribusi alat bantu di NTB. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Bisnis*, 4(1).
- World Health Organization. (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. Geneva: WHO.